

Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Analysis of the Implementation of Government Regulation Number 71 of 2010 in the Preparation of Financial Reports for the DPRD Secretariat of South Sulawesi Province

Nyi Ayu Tantri*, Firman Menne, Thanwain

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

*Correspondent author email: ayutantri228@gmail.com

Diterima: 04 September 2023 / Disetujui: 30 Desember 2023

Abstrak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Akuntansi Kantor Daerah (SIADINDA) sebagai implementasi PP 71 Tahun 2010 dalam laporan keuangan dan mengetahui kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penerapan SIADINDA pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara langsung dan dokumentasi berupa laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SIADINDA. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, antara lain dengan mereduksi data yaitu merangkum dan memilih hal-hal pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal penting dari peneliti lapangan. Kemudian data disajikan untuk memudahkan melihat gambaran penelitian dan kesimpulan menarik dari analisis yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan penerapan SIADINDA telah disusun sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Instansi pemerintah berdasarkan PP 71 Tahun 2010 harus menerapkan akuntansi berbasis akrual oleh karena itu sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan laporan keuangan.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, PP 71 Tahun 2010, SIADINDA, Sumber Daya Manusia

Abstract. Study aims to determine the application of Information Systems regional office accounting (SIADINDA) as the implementation of PP 71 of 2010 in financial statements and determine the ability of Human Resources (HR) in implementation SIADINDA at the Secretariat Office of the DPRD of South Sulawesi Province. This type of research is qualitative research. The data in this study were collected through observation, direct interviews and documentation in the form of financial reports generated from the SIADINDA application. The data analysis method used is descriptive qualitative, among others, by reducing the data, namely summarizing and selecting the main things, focusing on the important things from field researchers. Then the data is presented to make it easier to see the research picture and interesting conclusions from the analysis that has been done. The results of this study indicate that the preparation of financial statements at the Secretariat Office of the DPRD of South Sulawesi Province with the application of SIADINDA has been prepared in accordance with PP 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. Government agencies based on PP 71 of 2010 must apply accrual-based accounting therefore human resources play a very important role in carrying out financial reports.

Keywords: Financial Statements, PP 71 of 2010, SIADINDA, Human Resources



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Negara dapat memiliki pengertian bentuk persatuan kesatuan oleh kelompok manusia yang membentuk komunitas masyarakat yang dikelola oleh menggunakan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dibutuhkan oleh sebuah negara ialah pengelolaan pemerintahan yang baik. Istilah pengelolaan pemerintahan yang baik atau dalam Bahasa Inggris diterjemahkan menjadi good government governance menjadi tolak ukur tingkat kesuksesan pemerintah dalam menjalankan negara. Pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang dapat mengelola kandungan sumber daya tersedia dan

memiliki kemampuan mengaplikasikan pengelolaan anggaran yang bersifat transparansi serta memiliki akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintahan.

Pemerintah Indonesia sebagai bentuk dukungan atas perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good government governance*) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 mengenai Pertanggungjawaban terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan mengenai Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang berisi Keseimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menjelaskan mengenai ruang lingkup wewenang pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya secara mandiri tanpa melibatkan pemerintahan pusat. Pemerintahan di daerah bertugas serta berfungsi memanfaatkan seluruh sumber keuangan yang dapat dikelola berdasarkan ruang lingkup kebutuhan dan keinginan masyarakat yang disampaikan melalui aspirasi dengan pelaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang telah diberlakukan menjelaskan mengenai aturan standar dengan sistem akuntansi yang menggunakan metode basis kas menuju akrual mengalami perubahan disesuaikan dengan metode basis akrual penuh dalam melaporkan pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan mampu memberi peran dan pengaruh yang signifikan terhadap tata cara pembuatan dan sistematika penyusunan laporan pengelolaan keuangan dalam lingkup pemerintahan indonesia. Harapan yang ingin dicapai melalui perubahan metode tersebut ialah mampu mendeskripsikan secara detail sesuai kondisi faktual pengelolaan keuangan pemerintah serta menjelaskan informasi aktual yang didasarkan sesuai tugas dan fungsi pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam hal ini menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrual mampu menyampaikan laporan keuangan dimulai dengan akun aset, kewajiban serta ekuitas.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Akuntansi Kantor Daerah (SIADINDA) sebagai implementasi PP 71 Tahun 2010 dalam laporan keuangan dan mengetahui kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penerapan SIADINDA pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder. Menurut Sugiyono (2018) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan data sekunder digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai data dari catatan-catatan dokumentasi, artikel-artikel, internet serta berbagai referensi mengenai sistem dan prosedur penerbitan bank garansi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA)

Pengelolaan keuangan yang disusun menjadi laporan melalui aplikasi SIADINDA adalah sebuah inovasi penerapan ilmu akuntansi akrual berbasis aplikasi yang dikembangkan Divisi Sistem Perbendaharaan dan Divisi Akuntansi dan Pelaporan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Aplikasi ini memiliki tahapan pertama yakni perekaman dokumen yang selanjutnya membentuk rincian transaksi, kemudian rincian transaksi disimpan ke buku pencatatan lalu terakhir dirangkum dalam laporan keuangan. Keseluruhan tahapan tersebut diproses menggunakan program komputer yang terotomatisasi.

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan aplikasi SAI atau Sistem Akuntansi Instansi yang memiliki 3 (tiga) jenis sistem di dalamnya terdiri dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Sistem Persediaan serta Sistem Akuntansi Satker (SAS). Setiap dari sistem tersebut merupakan perpaduan yang tujuan akhirnya terintegrasi di dalam aplikasi SIADINDA.

SIADINDA ialah sebagai corong penampung seluruh data yang dikeluarkan setiap aplikasi di atas yang digunakan sebagai komponen dalam penyusunan laporan keuangan instansi. Finalisasi rincian berasal penyusunan laporan keuangan di aplikasi SIADINDA selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Keuangan melalui aplikasi e-Rekon.

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang bersifat selaku instansi pemerintahan vertikal wajib mengikuti anjuran dari peraturan yang telah ditetapkan sehingga dalam penyusunan laporan keuangan melalui aplikasi SIADINDA. Beberapa unsur yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan dalam menggunakan aplikasi SIADINDA belum tersedia, sehingga dalam hal ini Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selaku instansi pemerintah yang jalur koordinasinya secara vertikal juga menyesuaikan dengan penggunaan aplikasi SIADINDA dan peraturan yang berlaku.

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan membuat laporan keuangan yang dihasilkan melalui aplikasi SIADINDA dimana apabila menyesuaikan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 maka laporan tersebut terdiri dari Neraca Keuangan, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Selain itu Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyusun sendiri menggunakan aplikasi lainnya untuk Catatan atas Laporan Keuangan yakni melalui aplikasi CaLK yang terpisah dari aplikasi SIADINDA.

Hal ini disebabkan instansi tersebut termasuk dalam instansi Non Badan Layanan Umum (Non BLU) sehingga tidak mempunyai sumber pemasukan untuk kas yang berakibat tidak adanya Saldo Anggaran Lebih dan Arus Kas yang biasanya termasuk dalam laporan keuangan yang disusun. Gambar 1. menunjukkan tampilan aplikasi SIADINDA yang digunakan untuk membuat laporan keuangan:



Gambar 1. Dashboard Aplikasi SIADINDA

Mulai awal tahun 2015 saat pertama kali aplikasi SIADINDA digunakan, hanya terdapat 5 (lima) satuan kerja mencoba menggunakannya. Walaupun aplikasi ini telah beroperasi dan digunakan selama hampir 4 tahun bukan secara pasti menjadi jaminan seluruh satuan kerja yang menggunakannya sampai saat ini mampu melakukan penyusunan laporan keuangan secara mandiri. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh aplikasi SIADINDA yang terhubung dan terintegrasi bersama aplikasi lainnya dimana aplikasi tersebut memerlukan upaya tambahan dalam memahami tata cara yang baik dan benar dalam pengoperasiannya.

Laporan keuangan yang dibuat oleh masing-masing satuan kerja di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menerapkan aplikasi tersebut telah dianggap efisien dan efektif karena aplikasi tersebut merupakan produk merupakan rancangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Akan tetapi, Penulis berpendapat berdasarkan hasil pengamatan di lapangan ialah aplikasi SIADINDA tersebut belum memuat seluruh unsur yang disyaratkan berdasarkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang

membahas mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Unsur-unsur penyusunan laporan keuangan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 namun belum terdapat di penggunaan aplikasi SIADINDA antara lain yakni Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) termasuk menjadi jenis laporan penggunaan anggaran, penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai bagian dari laporan finansial serta Catatan Laporan Keuangan (CaLKn).

Setelah proses rekonsiliasi dilakukan, maka laporan keuangan telah dapat dipertanggungjawabkan serta telah sah untuk dipergunakan sebagai instrument dalam mengawasi dan mengambil tindakan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Beberapa komponen yang tercantum di dalam laporan keuangan yang dihasilkan melalui aplikasi SIADINDA terdiri dari:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran berisikan rekapan sumber, pemanfaatan, dan penggunaan keuangan yang diolah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki APBN dengan peruntukan pembelanjaan yakni belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja negara yang berpatokan pada laporan realisasi anggaran (LRA) di atas selama periode 2020 sampai 2021 tidak mengalami kenaikan dimana jumlah belanja sebanyak Rp. 168.450.000,00

b) Neraca

Neraca Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan situasi tingkat satuan kerja per 31 Desember 2021 dengan nilai Jumlah Aset senilai Rp. 160.264.013.452,39,- Kewajiban sebesar Rp. 494.118.016,00, - dan Ekuitas sebesar Rp. 159.769.895.436,39.

c) Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional merupakan gambaran rangkuman sumber daya ekonomi sebagai kesempatan dalam menambah ekuitas yakni pendapatan operasional, beban operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Akan tetapi, di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hanya terdapat sumber beban operasional dikarenakan anggaran yang dipergunakan hanyalah untuk keperluan belanja. Laporan yang ditampilkan ialah perbandingan dari jumlah laporan tahun pelaporan dan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2020 dan 2021 senilai Rp. 168.450.000,00.

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan deskripsi informasi pertambahan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini secara langsung menampilkan peningkatan maupun pengurangan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas yang berpatokan pada laporan neraca di atas selama periode 2021 mengalami kenaikan, dimana ekuitas akhir sebanyak Rp. 153.828.691.938,90- dan tahun 2020 sebanyak Rp. 134.847.485.066,75, -.

Implementasi aplikasi SIADINDA dilingkungan instansi dalam penyusunan laporan keuangan yang telah dipaparkan sebelumnya telah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, yang terdapat di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dengan akronim yang umum digunakan yakni SAP merupakan unsur-unsur akuntansi diimplementasikan melalui penyusunan dan penyampaian laporan keuangan di ruang lingkup pemerintahan. Laporan keuangan yang didasarkan pada peraturan yang berlaku memiliki beberapa jenis yakni:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
- 3) Neraca.
- 4) Laporan Operasional (LO).
- 5) Laporan Arus Kas (LAK).
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Jenis-jenis laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya menunjukkan bahwa laporan keuangan di lingkungan pemerintahan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi laporan pengelolaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial dan CaLK. Laporan pengelolaan anggaran termasuk di dalamnya yakni LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial berisikan Neraca, LO, LPE serta LAK. CaLK sendiri ialah laporan yang berisi detail atau penjelasan lebih lengkap terhadap sector-sektor yang terdapat di dalam laporan pengelolaan anggaran maupun laporan finansial dimana ketiga kelompok laporan tersebut memiliki sifat yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Kemampuan SDM dalam Implementasi Aplikasi SIADINDA

Hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh Peneliti menunjukkan gambaran kemampuan dan kompetensi SDM mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang dikelola melalui aplikasi SIADINDA. Salah satu narasumber yang menyampaikan fakta tersebut ialah pegawai yang bertugas mengoperasikan aplikasi SIADINDA disatuan kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dimana kondisi di lapangan yang terbatas SDM dengan latar belakang pendidikan ekonomi dapat dipenuhi dengan adanya sumber daya manusia yang mampu memahami dan mengoperasikan dengan baik aplikasi SIADINDA yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi lainnya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Sistem yang telah terintegrasi tersebut membutuhkan sinkronisasi dari setiap aplikasi dalam penggunaannya. Hal tersebut menegaskan bahwa kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan dalam memahami petunjuk teknis dan tahapannya. Faktor yang Penulis analisis sebagai bentuk upaya untuk memudahkan sistematika penyusunan laporan keuangan melalui aplikasi SIADINDA ialah dengan menempatkan SDM dengan latar belakang pendidikan di bidang keilmuan ekonomi khususnya jurusan akuntansi. Selain itu, kesempatan juga dapat diberikan kepada pegawai selain dari yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keilmuan ekonomi dengan cara memberikan pelatihan maupun bimbingan teknis yang dapat diadakan secara intern di lingkungan Sekretariat DPRD maupun pendidikan dan pelatihan dari lingkup instansi pemerintah lainnya.

Peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan perlu berlandaskan keinginan dan motivasi yang kuat dari pihak SDM sehingga mampu menyusun dan mengelola serta bertanggungjawab terhadap laporan keuangan yang dibuat secara lengkap di masing-masing satuan kerja bertugas. Hal ini merupakan contoh dari penerapan kemandirian entitas. Asumsi kemandirian entitas tercantum di dalam PP 71 tahun 2010 dimana dijelaskan bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan memiliki kewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kendala maupun selisi di masing-masing unit instansi pemerintah dalam upaya menyampaikan laporan keuangan.

Penggunaan aplikasi SIADINDA sebagai instrument bantuan untuk menyusun laporan keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan. Beberapa jenis laporan yang tidak termasuk ialah Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas disebabkan status Sekretariat DPRD tidak termasuk ke dalam Badan Layanan Umum (Non BLU) dikarenakan tidak adanya sumber pemasukan dan kas, dimana pendapat diperoleh melalui pengajuan pembelanjaan ke pihak KPPN yang selanjutnya menerbitkan SPM dengan target mencapai saldo akhir nihil. Sementara itu Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang tersusun terpisah melalui aplikasi CaLK. Pada dasarnya, seluruh aplikasi tersebut telah terintegrasi dan saling berkaitan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyampaian laporan keuangan yang telah disusun oleh Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kaitan erat dengan implementasi penggunaan aplikasi SIADINDA dengan mengacu kepada PP No 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Instansi yang memiliki anggaran pendapatan maupun kas diwajibkan untuk membuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Instansi selain itu tidak diwajibkan. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dibuat dan disusun terpisah menggunakan aplikasi CaLK. Secara fundamental, keseluruhan aplikasi yang digunakan membentuk sebuah sistem keseluruhan. Kompetensi yang dimiliki para pegawai yang diperlukan dalam mengetahui dan mampu

mengelola serta mengoperasikan aplikasi dalam pelaporan keuangan terbatas dan tidak setiap satuan kerja memilikinya. Kendala yang terjadi di lapangan ialah terbatasnya SDM dengan latar belakang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi. Hal ini dapat diatasi dengan menimbulkannya keinginan dan motivasi yang kuat bagi SDM dengan latar belakang pendidikan selain akuntansi berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis aplikasi SIADINDA sehingga dapat mengurangi terjadinya pelimpahan beban kerja ke satuan kerja lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akinbuli, 2013. An Assessment of Accountability in The Publik Sector in Nigeria. *Arabian Journal of Business and Management Review*.
- Azlina, Nur dan Ira Amelia, 2014. Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi, Universitas Jember*.
- Azlim, Darwanis dan Usman Abu Bakar, 2015. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Skpd Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana: Universitas Syiah Kuala*.
- Bahri, 2016. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Andi. Jumingan, 2017. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara. Kasmir, 2017. Analisis Laporan Keuangan. Raja Grafindo, Jakarta.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2017. *Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition*. United States of America: Wiley.
- Mulyana, 2010. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Cet. XIV. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Munandar, Utami, 2016. Mengembangkan Bakat dan Kreatiivitas Anak Sekolah. Jakarta: PT. Gramedia
- Mu'am, 2016. Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Tangerang Selatan: Mifaz Rasam Publishing.
- Sari, Eka Nurmala, 2015. Accounting Practices Effectiveness and Good Governance: Mediating Effect of Medan City, Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*.
- Sarosa, 2012. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar. Jakarta Barat: PT Indeks.
- Siska Yulia Defitri, 2017. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. *National Conference of Applied Science, Engineering, Business and Information technology, Politeknik Negeri Padang*.
- Tua, Manuppan Bangun, 2015. Pengaruh Good Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jom FEKON*.
- Widari, Liziana dan Sutrisno. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sukabumi: *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi*. Vol. 5, Edisi. 10.
- Yasmeen, Diptarina., & Hermawati, S. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 20, No. 1.
- Zeyn, Elfira, 2017. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan.